

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintahan Desa (E-Gov) di Indonesia

Dadan Kurniansyah

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: dadan.kurniansyah@staff.unsika.ac.id

Hannie

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: hannie@staff.unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan teknologi informasi yang dikembangkan Pemerintahan Desa dalam mengatasi permasalahan pemerintahan desa agar mampu mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan (e-Gov). Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui interview, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, visi Pemerintah Kabupaten Karawang sudah mendukung model pengembangan Sistem informasi pelaporan berbasis internet seperti Siskeudes-Prodeskel tapi belum menyentuh pengembangan layanan kepada masyarakat dan baru satu desa yang melaksanakan. Sumber daya manusia belum memenuhi standar yang diharapkan, salahsatunya adalah terputusnya kaderisasi SDM akibat Pilkades. Proses penyelenggaraan pelayanan pemerintah desa dalam e-gov baru dalam bentuk pelaporan saja bukan untuk informasi kepada masyarakat desa. Desa masih kekurangan dalam aksesibilitas dan jaringan, karena tidak semua zona atau wilayah di Desa mampu menangkap sinyal untuk internet dan mekanisme manajemen resiko dalam yang berkaitan dengan e-Gov sama sekali belum dibahas.

Kata Kunci: *Electronic Government (E-Gov), Pemerintahan Desa*

Abstract

This study aims to examine the development of information technology developed by the local Government that can contribute in addressing the problems of local governance in order to be able to optimize the development and use of government information technology (e-Gov). The research method uses qualitative methods, qualitative data analysis and data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. The results showed that the vision of the Karawang District Government had supported the development model of an internet-based reporting information system such as the Siskeudes-Prodeskel but had not touched the development of services to the community and only one village had implemented it. Human resources have not met the expected standards, one of which is the severing of human resource regeneration due to the local

election. The process of implementing government services in the new e-gov in the form of reporting is not just for information to the village community. The Villages have out of accessibility and networking, because not all regions in the village are able to capture signals for the internet and risk management mechanisms in relation to e-Gov have not been discussed at all.

Key Word: Electronic Government (E-Gov), Local/Village Government

PENDAHULUAN

Substansi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah memberikan kewenangan kepada Daerah maupun Desa untuk membangun daerahnya dalam rangka mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan pembangunan di Daerah adalah terciptanya tatakelola administrasi dan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan transparan sehingga mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat dan tertibnya administrasi pemerintahan.

Berkembangnya konsep *electronic government (e-gov)* yang menjadi trend dan kebutuhan pelayanan saat ini, merubah pola pelayanan pemerintah dan tata kelola administrasi pemerintah mulai memanfaatkan teknologi informasi yang pelaksanaannya sampai ke Pemerintah Desa. Oleh karena itu, mengkaji *e-government (e-gov)* melibatkan berbagai pendekatan keilmuan, melalui pendekatan teknologi komunikasi dan informasi, manajemen, politik dan pemerintahan. Namun, dalam penelitian ini difokuskan pendekatan manajemen pemerintahan dan teknologi informasi.

Berbagai versi yang mendefinisikan e-Government dari lembaga internasional maupun hasil kajian cukup banyak, misalnya definisi e-Government menurut UNDP (Indrajit,2006) menyatakan "*e-Government is the application of information and communication Tchnology (ICT) by government agencies*". Menurut vendor software terkemuka SAP dalam (Indrajit, 2006) mengemukakan"*e-Government is a global reform movement to promote internet use by government agencies and everyone who deals with them*". Lebih jauh fenomena *disruption* mulai menjadi trend, suatu hal yang harus dihadapi masyarakat dan pemerintah disetiap level pemerintahan. Sebagaimana dikatakan Kassali (2017) yang menegaskan lima hal penting dalam disruption, yaitu :

Pertama, disruption berakibat penghematan banyak biaya melalui proses bisnis yang menjadi lebih simpel. Kedua, ia membuat kualitas apapun yang dihasilkannya lebih baik

ketimbang yang sebelumnya. Kalau lebih buruk, jelas itu bukan disruption. Lagipula siapa yang mau memakai produk/jasa yang kualitasnya lebih buruk? Ketiga, disruption berpotensi menciptakan pasar baru, atau membuat mereka yang selama ini ter-eksklusi menjadi ter-inklusi. Membuat pasar yang selama ini tertutup menjadi terbuka. Keempat, produk/jasa hasil disruption ini harus lebih mudah diakses atau dijangkau oleh para penggunanya. Seperti juga layanan ojek atau taksi online, atau layanan perbankan dan termasuk financial technology, semua kini tersedia di dalam genggaman, dalam smartphone kita. Kelima, disruption membuat segala sesuatu kini menjadi serba smart. Lebih pintar, lebih menghemat waktu dan lebih akurat. Itulah lima ciri disruption yang belakangan ini marak terjadi di mana-mana. Apakah itu hanya terbatas pada industri digital? Jelas tidak. Perbaikan proses bisnis, misalnya, mampu memangkas biaya-biaya yang tidak perlu.

Hasil penelitian Akbar (2018) menunjukkan bahwa penelitian pengembangan electronic government (e-Gov) merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. e-Gov merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. *The Open Group Architecture Framework* (TOGAF) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam perencanaan dan perancangan e-Gov. Penerapan model e-Government dilakukan secara bertahap mulai dari pengadaan fasilitas yang lebih baik, pemerataan jaringan komunikasi, dan peningkatan sumber daya manusia (aparatur desa) yang lebih baik, selanjutnya akan diterapkan model *e-Government* yang telah dibangun.

Hasil penelitian Septiana (2017) menguraikan *e-government* pada Desa Wonokarto merupakan elektronik pemerintahan berbasis web yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada publik. Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Proses pembuatan e-government Desa Wonokarto ini dilakukan dengan menganalisis menganalisis sistem yang telah ada pada Desa Wonokarto, kemudian mendesain web dan basis data MySQL. *Elektronik Government* pada Desa Wonokarto diharapkan dapat membantu aparatur pemerintahan dalam pembuatan surat serta memberikan pelayanan dan informasi yang tepat dan cepat melalui akses internet.

Untuk penelitian ini, digunakan analisis *Government Capacity Check* dengan menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi kesiapan pemerintah desa untuk mengembangkan e-government. Oleh karena itu, Pemerintah Desa di Kabupaten Karawang mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi Pemerintahan Desa, diantaranya *Siskeudes* (Sistem Keuangan Desa), *Prodeskel* (Profil Desa dan kelurahan) dan *e-planning* (perencanaan desa) dan aplikasi lainnya yang sedang dalam proses penerapan ke Desa

Pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang mendukung pengembangan teknologi informasi di desa masih memiliki kendala, yaitu kurangnya sumber daya pelaksana (SDM), masih adanya gangguan dalam jaringan dan konektivitas (infrastruktur) dan masih adanya petunjuk teknis yang belum diperkuat oleh peraturan yang ada (SOP). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan kesiapan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menerapkan dan mengembangkan *e-government* untuk pemerintah desa maka beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu:

Pertama, terkait visi Bupati Karawang yang mengedepankan penerapan teknologi informasi dalam konteks *e-government* kurang direspon secara cepat oleh para pemangku kepentingan Desa dan Kabupaten dengan lambatnya penyelesaian peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan di desa. Kedua, terkait informasi yang diterima oleh masyarakat desa melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa yang masih belum optimal. Ketiga, terkait dengan kepemimpinan kepala desa yang kurang mampu mempengaruhi perilaku masyarakat desa dan aparaturnya untuk mencapai tujuan *e-government*, khususnya menggerakkan partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam penerapan *e-government*.

Penelitian ini mengkaji 6 aspek untuk mengetahui kesiapan pemerintah menghadapi penerapan konsep dan prinsip *e-government*, menurut metode tersebut yaitu: aspek *e-strategy*, aspek *architecture*, aspek *risk and program management*, aspek *organizational capabilities*, aspek *value chain management* dan aspek *performance management* dengan sub-sub aspek yang secara detail mempertajam analisis.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji pengembangan teknologi informasi yang dikembangkan Pemerintahan Desa dalam mengatasi permasalahan pemerintahan desa agar mampu mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan (e-Gov) dan berguna dalam mengidentifikasi aspek yang

harus dilaksanakan dan memerlukan perbaikan serta pengembangan lebih lanjut dalam kerangka *e-Government* di desa yang berada di Kabupaten Karawang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell (2014) Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang sejumlah individu atau kelompok orang dianggap dari sosial atau kemanusiaan. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu Rasional, Empiris dan Sistematis. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan. Sumber data menggunakan sumber *data primer* dan *data sekunder*. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu pengembangan *e-Government* Pemerintah Desa di Kabupaten Karawang dengan memperhatikan informan yang dianggap memberikan informasi dan data yang mendukung analisis data faktor pengembangan *e-Government* di desa. Penelitian menggunakan sampel *purposive* dengan informan-informan penelitian yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Desa dan Sekretaris Desa di tujuh Desa di Kabupaten Karawang, yaitu Kabid Pemdes, Kabid Bangdes, Kasi PLKD, Kepala Desa Jatilaksana, Kepala Desa Dukuh karya, Kepala Desa Mekarmaya, Sekretaris Desa Sukaluyu, Sekretaris Desa Warung Bambu, Sekretaris Desa Sungai Buntu dan Sekretaris Desa Cintelanggeng Kabupaten Karawang. Merujuk pada konsep Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014), maka analisis data penelitian ini mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis dengan proses analisis data kualitatif yaitu: reduksi data, display data, verifikasi dan menggunakan teknik triangulasi (Alwasilah, 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang DPMD merupakan dinas teknis yang memiliki kewenangan dalam memberikan pembinaan,

fasilitasi dan pembangunan untuk Desa, DPMD Kabupaten Karawang mengembangkan struktur organisasi dalam empat bidang yaitu : Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pengembangan Desa, Bidang Kelembagaan Desa dan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa. Selain itu, ada sembilan seksi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karawang. Sarana yang berhubungan dengan teknologi informasi yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang hanya dalam bentuk Komputer dan Notebook/laptop yang jumlahnya sebanyak 10 buah. selain itu, khusus yang mengoperasikan komputer yang ada di DPMD masih terbatas dan tidak secara khusus dipersiapkan untuk pengembangan e-Gov. Secara khusus, pengembangan teknologi informasi Pemerintah Kabupaten Karawang berada dalam kewenangan Dinas teknis lain, yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Karawang.

Dalam penelitian ini, dilakukan observasi ke 7 Desa yang memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda berdasarkan tipologi, peringkat/klasifikasi dan keunggulan yang nantinya dianalisis untuk melihat sejauhmana penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut memanfaatkan teknologi informasi menuju *elektonic government* (e-gov).

Tabel 1. Nama Desa Sebagai Obyek Penelitian

No	Nama Desa	Kecamatan	Tipologi	Klasifikasi	Keunggulan
1	Jatilaksana	Pangkalan	Persawahan	Swadaya	Wisata
2	Dukuh karya	Rengasdengklok	Persawahan	Swadaya	Kuliner
3	Mekarmaya	Cilamaya Wetan	Persawahan	Swadaya	BUMDES
4	Sukaluyu	Telukjambe Timur	Industri/jasa	Swakarya	Jasa
5	Warung Bambu	Karawang Timur	Industri/jasa	Swakarya	BUMDES
6	Sungai Buntu	Pedes	Pesisir	Swadaya	BUMDES
7	Cintalanggeng	Tegalwaru	Persawahan	Swadaya	BUMDES

Sumber : Hasil Olah Data, 2019

Setiap desa yang menjadi obyek observasi penelitian memiliki perbedaan dalam kondisi wilayah dan keunggulan masing-masing. Jumlah Desa di Kabupaten Karawang sebanyak 297 Desa dan semuanya memiliki kondisi wilayah yang berbeda, walaupun dari tipologi rata-rata adalah persawahan, jasa/industri dan pesisir. Desa jatilaksana dipilih sebagai salahsatu obyek penelitian, karena Desa Jatilaksana mulai merintis mengembangkan e-government dengan model layanan kepada masyarakat (*Government to Citizen atau G to C*) dan memiliki keunggulan wisata dengan pesawahan sebagai obyek wisatanya.

Dukuh karya dipilih sebagai salah obyek penelitian, karena Desa Dukuh Karya memiliki keunggulan kuliner tradisional dan proses estafet kepemimpinan pemerintah desa yang cenderung kondusif. Desa Mekarmaya dipilih sebagai salahsatu obyek penelitian, karena Desa Mekarmaya memiliki BUMDES yang bergerak dalam bisnis internet yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Mekarmaya. Namun, yang sangat disayangkan saat ini kondisi sosial politik desa cukup mengganggu perkembangannya.

Desa Warung Bambu pun memiliki karakter yang sama dengan Mekarmaya, hanya saja Desa Warung Bambu berada pada kawasan jasa dan industri, sedangkan Mekarmaya berada pada kawasan persawahan. Desa Sungaibuntu dipilih karena untuk mewakili wilayah desa yang bertipologi pesisir sementara Desa Cintalanggeng tipologinya persawahan yang berada pada daerah perbukitan dan hutan, Keduanya memiliki BUMDES yang sudah berjalan cukup lama dan dapat dikatakan mampu memanfaatkan potensi Desa.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan *E-Government* (E-Gov)

Aspek *E-Strategy*; Aspek ini merupakan aspek strategis karena yang dianalisis adalah keseriusan pemerintah yang dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Karawang yang kewenangannya berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang dan Pemerintah Desa di Kabupaten Karawang. Substansinya, kedua pemangku kepentingan memahami, menginginkan dan memiliki konsep yang jelas mengenai e-Government yang ingin dilaksanakan di Desa. Empat indikator yang menjadi acuan analisis dimensi ini yaitu;

Pertama, indikator e-vision yang berhubungan dengan visi seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) yang dilaksanakan dalam proses sosialisasi, pemahaman dan dukungan birokrasi yang ada di tingkat Kabupaten dan Desa. Kedua, indikator Governance yang berhubungan dengan dukungan institusi dalam capaian visi misi e-government, sikap pemimpin, koordinator dan fasilitator proyek e-government. Ketiga, strategi, perencanaan dan kebijakan yang sejalan dengan strategi pembangunan nasional. Keempat, resources commitment yang berhubungan dengan alokasi sumber daya pada proyek e-government seperti sumber daya manusia, aset-aset dan keuangan/anggaran).

Berdasarkan hasil penelitian, identifikasi isu strategis merupakan analisa internal mengenai kondisi eksisting dari DPMD dan Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Karawang yang menjadi asumsi dasar menyusun visi seluruh pemangku kepentingan yang dilaksanakan dalam proses sosialisasi, pemahaman dan dukungan birokrasi yang ada di

tingkat Kabupaten dan Desa. Dalam hal ini, yang berkaitan dengan fokus penelitian adalah isu strategis yang menekankan kompetensi SDM, data dan informasi desa serta pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG). Visi stakeholders yang berkepentingan dalam mengembangkan e-gov secara umum ada dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Karawang dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Namun yang secara khusus merencanakan dan berkeinginan untuk mengembangkan e-Government lebih detailnya ada pada Renstra DPMD yang mengangkat Teknologi Tepat Guna (TTG). Selain itu, minimnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang dalam hal ini dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Karawang kepada pemerintah desa dalam hal pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan hambatan klasik yang selalu menjadi alasan. Oleh karena itu, dampaknya terhadap tingkat pemahaman dari pemangku kepentingan dan dukungan pengembangan teknologi informasi kurang direspon dengan baik dan terus dianalisis dalam relasi dengan desa.

Dukungan birokrasi tingkat Kabupaten akan mempengaruhi percepatan program pengembangan teknologi informasi di Desa. Hal ini berkaitan dengan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Desa masih memerlukan upgrading yang difokuskan pada teknologi informasi. Lebih lanjut berdasarkan informasi yang berhubungan dengan dukungan institusi dalam capaian visi misi, sikap pemimpin, koordinator dan fasilitator pelayanan Kecamatan yang berbasis e-Gov masih memerlukan analisis lebih lanjut setelah semua data dan informasi dari Desa dapat direduksi.

Strategi dan perencanaan yang sejalan dengan strategi pembangunan nasional, sudah menyesuaikan dengan strategi nasional dalam pengembangan e-Gov. Akan tetapi, perencanaan dan realisasi yang menjadi tanggungjawab pemangku kepentingan ditingkat kabupaten dan desa masih memerlukan pendalaman analisis lebih lanjut. Relasinya kepada *resources commitment* yang berhubungan dengan alokasi sumber daya proyek e-government seperti sumber daya manusia, aset-aset dan keuangan/anggaran) yang tentunya tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa, melainkan sinergi bersama seluruh tingkatan pemerintahan.

Tabel 2. Temuan dan Intepretasi Hasil Wawancara Aspek E-Strategy

No	Dimensi	Uraian	Temuan, Intepretasi Hasil Wawancara
1	<i>E-Vision</i>	Berhubungan dengan visi seluruh <i>stakeholders</i> yang dilaksanakan dalam proses sosialisasi, pemahaman dan dukungan birokrasi yang ada di tingkat Kabupaten dan Desa	Visi Pemerintah Kabupaten Karawang sudah mengikuti visi Pemerintah Pusat yang mendukung model pengembangan Sistem informasi pelaporan berbasis internet seperti Siskeudes-Prodeskel) yang skemanya model G to G dan G to E sementara model G To C sebagai pengembangan layanan kepada masyarakat desa baru 1 desa yang melaksanakan yaitu Jatilaksana dengan Aplikasi Simpel Desa.
2	<i>Governance</i>	Berhubungan dengan dukungan institusi dalam capaian visi misi <i>e-government</i> , sikap pemimpin, koordinator dan fasilitator proyek <i>e-government</i> .	Fasilitator dari Pemerintah Kabupaten karawang kewenangannya berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sudah mengarah pada pengembangan e-government dengan Renstra yang sudah mencantumkan pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna)
3	Strategi	Berhubungan perencanaan dan kebijakan yang sejalan dengan strategi pembangunan nasional	Arah kebijakan sudah mengikuti kebijakan nasional dengan model G to G dan G to E yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah pusat
4	<i>Resources c Commitment</i>	Berhubungan dengan alokasi sumber daya pada proyek <i>e-government</i>	Dalam model pengembangan saat ini, sumber daya manusia yang menjadi pelaksana masih belum memenuhi standar yang diharapkan dan masih memerlukan proses pelatihan teknis melalui BINTEK

Aspek Arhitecture. Dimensi ini berhubungan dengan arsitektur sistem dan teknologi informasi yang dimiliki oleh pemerintah dengan 6 indikator yang dapat dijadikan acuan analisis yaitu: Pertama, *bussiness model* yang mempertanyakan sejauhmana pemetaan seluruh proses pelayanan di birokrasi yang akan ditransformasikan dalam e-gov. Sampai saat ini, pemetaan proses pelayanan di tingkat desa baru seputar aplikasi pelaporan kinerja program dan keuangan saja. Untuk seluruh pelayanan desa belum bisa dikatakan ditransformasikan, karena masih memiliki banyak kelemahan, khususnya dalam hal kebijakan ditingkat Pemerintah Kabupaten.

Terkait hal ini, masih terus diperdalam analisisnya sampai terkumpul semua informasi dari Desa. Berdasarkan hasil penelitian, pemetaan proses pelayanan di dalam

proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditransformasikan dalam e-gov baru dalam bentuk aplikasi yang menginput data dan informasi mengenai proses-proses pelaporan saja dalam bentuk profil desa (prodeskel), Keuangan Desa (siskeudes). Namun, secara khusus desa yang menjadi lokus penelitian ini sudah memiliki website sendiri, walaupun dalam tampilan yang masih sederhana.

Kedua, *security* yang menganalisis penerapan sistem keamanan e-gov terjamin dalam transaksi dengan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, sampai saat ini transaksi keuangan melalui jaringan yang ada di Desa dan DPMD belum dapat dilakukan. Terkait *security* yang menganalisis penerapan sistem keamanan e-gov terjamin dalam transaksi dengan pemerintah, belum ada dalam pelaksanaannya karena transaksi secara online yang melibatkan perpindahan uang secara online, tidak pernah dilakukan. Proses transaksi tetap melalui perbankan yang ditunjuk. Hal ini menghindari resiko yang dapat terjadi dalam proses transaksi online yang menggunakan jaringan internet. Komitmen dalam model transaksi dalam jaringan sudah dilaksanakan oleh perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan Kabupaten, namun transaksi dalam jaringan aplikasi untuk proses pengembangan e-Gov di Desa belum samasekali terbangun atau direncanakan.

Ketiga, pemetaan data dan relasinya yang dikelola e-Gov seperti struktur, penyimpanan, akses, distribusi data mentah yang selanjutnya diolah menjadi informasi dan pengetahuan. Penyimpanan dan akses distribusi data, berada di masing-masing tingkatan lembaga (Desa, Dinas dan Pemkab/Provinsi/Pusat). Namun, hanya sebatas penyimpanan informasi saja terkait pelaporan-pelaporan berbasis aplikasi dan bukan untuk informasi kepada masyarakat. Selanjutnya ini masih memerlukan pendalaman analisis terkait beberapa aturan yang membatasi kewenangan masing-masing lembaga.

Keempat, mendefinisikan dan menerapkan aplikasi /software e-gov sehingga adanya pengintegrasian aplikasi berbeda agar sistem aplikasi tersebut berlaku secara holistik (aplikasi). Pemerintah Desa baru memperoleh program aplikasi seperti Siskeudes, Prodeskel dan e-planning. Ketiga aplikasi tersebut masih memiliki kekurangan dalam aksesibilitas dan jaringan, karena tidak semua zona atau wilayah di Desa mampu menangkap sinyal untuk internet.

Kelima, standar spesifikasi hardware dianalisa untuk tidak menghambat pengintegrasian sistem informasi karena harus memperhatikan faktor biaya, resiko, ketersediaan, trend, dan lain sebagainya (teknologi). Informasi dan data terkait standar

hardware, pemerintah desa hanya sebatas user dan tidak mengetahui secara jelas standar hardware.

Tabel 3. Temuan dan Intepretasi Hasil Wawancara Aspek *Arhitecture*

No	Dimensi	Uraian	Temuan, Intepretasi Hasil Wawancara
1	<i>Bussiness Model</i>	Sejauhmana pemetaan seluruh proses pelayanan di birokrasi yang akan ditransformasikan dalam e-gov.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan proses pelayanan di tingkat desa baru hanya seputar aplikasi pelaporan kinerja program dan keuangan saja. seluruh pelayanan desa belum ditransformasikan, karena masih memiliki banyak kelemahan, khususnya dalam hal kebijakan ditingkat Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan hasil penelitian, pemetaan proses pelayanan di dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditransformasikan dalam e-gov baru dalam bentuk aplikasi yang menginput data dan informasi mengenai proses-proses pelaporan saja dalam bentuk <i>profil desa (prodeskel)</i> , Keuangan Desa (<i>siskeudes</i>).
2	<i>Security</i>	Menganalisis penerapan sistem keamanan e-gov terjamin dalam transaksi dengan pemerintah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi keuangan melalui jaringan yang ada di Desa dan DPMD belum dapat dilakukan. Terkait <i>security</i> yang menganalisis penerapan sistem keamanan e-gov terjamin dalam transaksi dengan pemerintah, belum ada dalam pelaksanaannya karena transaksi secara online yang melibatkan perpindahan uang secara online, tidak pernah dilakukan. Proses transaksi tetap melalui perbankan yang ditunjuk. hal ini menghindari resiko yang dapat terjadi dalam proses transaksi online yang menggunakan jaringan internet. Komitmen dalam model transaksi dalam jaringan sudah dilaksanakan oleh perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan Kabupaten, namun transaksi dalam jaringan aplikasi untuk proses pengembangan e-Gov di Desa belum samasekali terbangun atau direncanakan.

3	Pemetaan data dan relasinya	Menganalisis pemetaan data dan relasinya yang dikelola e-Gov dalam struktur, penyimpanan, akses, distribusi data mentah yang selanjutnya diolah menjadi informasi dan pengetahuan	Bahwa penyimpanan dan akses distribusi data, berada di masing-masing tingkatan lembaga (Desa, Dinas dan Pemkab/ Provinsi/Pusat). Namun, akses tersebut hanya sebatas penyimpanan informasi saja terkait pelaporan berbasis aplikasi dan bukan untuk informasi kepada masyarakat.
4	Mendefinisikan dan menerapkan aplikasi/ software e-gov	Menganalisis penerapan aplikasi yang dapat diterapkan secara holistik	Hasil penelitian menunjukkan sudah ada pengintegrasian aplikasi yang berbeda agar sistem aplikasi tersebut berlaku secara holistik (aplikasi). Aplikasi yang sudah terakses seperti Siskeudes, Prodeskel dan e-planning. Ketiga aplikasi tersebut masih memiliki kekurangan dalam aksesibilitas dan jaringan, karena tidak semua zona atau wilayah di Desa mampu menangkap sinyal untuk internet.
5	Standar spesifikasi hardware	Menganalisis spesifikasi hardware yang digunakan dan tidak menghambat sistem	Hasil penelitian menunjukkan pengintegrasian sistem informasi tidak terhambat, namun informasi dan data terkait standar hardware, pemerintah desa hanya sebatas user dan tidak mengetahui secara jelas standar hardware yang digunakan.

Aspek Risk And Program Management. Manajemen e-government menghadapi resiko dalam proses pengembangan dan implementasinya dengan memperhatikan 4 indikator yang penting yaitu:

Pertama, *risk management*. Hal ini berkaitan dengan mekanisme/ dalam mengidentifikasi, mengkaji, memonitor resiko yang timbul dalam pengembangan e-government. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPMD Kabupaten Karawang dan observasi penelitian pada beberapa desa, mekanisme dan monitor resiko yang dimaksud dalam indikator tersebut tidak ada. Jikalau hanya pengawasan dalam konteks pemerintahan selama ini sudah berjalan sebatas monitoring dan evaluasi program pemerintah desa. Keterkaitan dengan e-Gov sama sekali belum dibahas.

Kedua, *portofolio Management*. Hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam pengelolaan program/pengembangan e-Gov dari mulai perencanaan, monitoring dan evaluasi disertai dampak terhadap seluruh program e-gov. Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Karawang melalui DPMD hanya dilakukan dalam proses monitoring dan evaluasi, karena perencanaan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Ketiga, *project management* . Hal ini berkaitan dengan mekanisme pengelolaan proyek e-gov yang sesuai kaidah. Berdasarkan penelitian, belum ada sama sekali SOP khusus yang membahas mengenai hal ini. Sehingga, diperlukan kajian lebih mendalam dengan melibatkan pihak lain yang lebih memiliki kewenangan dalam tatakelola e-Government.

Keempat, *business transformation*. Berkaitan dengan pengendalian perubahan lingkungan karena adanya transformasi prosedur pemerintahan yang struktural menuju implementasi e-gov yang berbasis proses. Hal ini masih menjadi wacana di tingkat Pemerintah Kabupaten, bagaimanapun semua proses dan prosedur pemerintahan bertransformasi dalam lingkungan budaya organisasi pemerintah desa dan kabupaten, tidak dapat begitu saja berubah dan mengikuti perubahan tersebut. Perlu waktu dan penyesuaian yang tidak mudah dan mungkin juga akan ada resistensi.

Tabel 4. Temuan dan Intepretasi Hasil Wawancara Aspek Risk and Program Management

No	Dimensi	Uraian	Temuan, Intepretasi Hasil Wawancara
1	<i>Risk Management</i>	Sejauhmana mekanisme/ dalam mengidentifikasi, mengkaji, memonitor resiko yang timbul dalam pengembangan e-government	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan monitor resiko yang dimaksud dalam indikator tersebut tidak ada. Jikalau hanya pengawasan dalam konteks pemerintahan selama ini sudah berjalan sebatas monitoring dan evaluasi program pemerintah desa. Keterkaitan dengan e-Gov sama sekali belum dibahas
2	<i>Portofolio Management</i>	Hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam pengelolaan program/pengembangan e-Gov dari mulai perencanaan, monitoring dan evaluasi disertai dampak terhadap seluruh program e-gov.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini hanya dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang kewenangannya ada di pemerintah pusat dalam implementasi aplikasi yang saat ini digunakan oleh desa
3	<i>Project Management</i>	Hal ini berkaitan dengan mekanisme pengelolaan proyek e-gov yang sesuai kaidah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada sama sekali SOP khusus yang membahas mengenai hal ini. Sehingga, diperlukan kajian antara DPMD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dengan pihak lain yang lebih memiliki kapabilitas dalam tatakelola e-Government.
4	<i>business transformation</i>	Hal ini berkaitan dengan pengendalian perubahan lingkungan karena adanya transformasi prosedur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini masih menjadi wacana di tingkat Pemerintah Kabupaten, bagaimanapun semua proses dan prosedur

		pemerintahan yang struktural menuju implementasi e-gov yang berbasis proses.	pemerintahan bertransformasi dalam lingkungan budaya organisasi pemerintah desa dan kabupaten, tidak dapat begitu saja berubah dan mengikuti perubahan tersebut. Perlu waktu dan penyesuaian yang tidak mudah dan mungkin juga akan ada resistensi.
--	--	--	---

Aspek Organizational Capabilities. Kemampuan pihak internal yang ada dalam sistem pemerintahan untuk beradaptasi dengan konsep organisasi baru yang ditawarkan e-government, ada 3 indikator yaitu:

Pertama, *e-Government Competencies*. Hal ini berhubungan dengan keberadaan dan mekanisme pemerintahan dalam mendefinisikan, merekrut, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan untuk implementasi e-government. Mekanisme pemerintahan yang mampu ikut mengembangkan pelaksanaan e-government harus didukung oleh sumberdaya manusia yang kompetensinya penguasaan teknologi informasi. Hasil penelitian memperlihatkan sebaliknya, masih kurang dalam mempersiapkan sumber daya berkompeten di Desa maupun di DPMD Kabupaten Karawang. Sampai saat ini hanya sebatas Bintek yang menjadi program peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi operator di Desa.

Kedua, *e-Government Tools and Techniques*. Hal ini berhubungan dengan kepemilikan teknik dan metodologi (plus fasilitas) oleh pemerintah sebagai sarana penunjang dalam perencanaan , desain/model, kontruksi, implementasi, dan evaluasi sistem e-Gov. Sampai saat ini belum dapat direalisasikan oleh pemerintah Desa dan Kabupaten Karawang.

Ketiga, *Organizational Learning*. Hal ini berhubungan dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan dan mendistribusikan pengetahuan yang dimilikinya melalui pemrosesan terhadap data dan informasi sehari-hari kepada mereka dikalangan internal yang membutuhkan. Hal ini sudah berjalan, dalam proses input data dan informasi aplikasi (Siskeudes, Prodeskel dan e-Planning). Namun demikian, ditingkat desa masih kurang diperhatikan, karena ada operator khusus yang mengoperasikan aplikasi serta menjadi kewenangan Kades/Lurah untuk menjadi operator.

Tabel 5. Temuan dan Intepretasi Hasil Wawancara Aspek *Organizational Capabilities*

No	Dimensi	Uraian	Temuan, Intepretasi Hasil Wawancara
1	<i>E-Government Competencies.</i>	Hal ini berhubungan dengan mekanisme pemerintahan yang mampu ikut mengembangkan pelaksanaan <i>e-government</i> harus didukung oleh sumberdaya manusia yang kompetensinya penguasaan teknologi informasi.	Hasil penelitian memperlihatkan sebaliknya, masih kurang dalam mempersiapkan sumber daya berkompeten di Desa maupun di DPMD Kabupaten Karawang.
2	<i>e-Government Tools and Techniques</i>	Hal ini berhubungan dengan kepemilikan teknik dan metodologi (plus fasilitas) oleh pemerintah sebagai sarana penunjang dalam perencanaan , desain/model, kontruksi, implementasi, dan evaluasi sistem <i>e-Gov</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sampai saat ini belum dapat direalisasikan oleh pemerintah Desa dan Kabupaten Karawang.
3	<i>Organizational Learning</i>	Hal ini berhubungan dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan dan mendistribusikan pengetahuan yang dimilikinya melalui pemrosesan terhadap data dan informasi sehari-hari kepada mereka dikalangan internal yang membutuhkan	Hasil penelitian menunjukkan berjalan hanya dalam proses input data dan informasi aplikasi (<i>Siskeudes, Prodeskel dan e-Planning</i>), sehingga ditingkat desa masih kurang diperhatikan, karena ada operator khusus yang mengoperasikan aplikasi serta menjadi kewenangan Kades/Lurah untuk menjadi operator dari aplikasi tersebut yang sangat tergantung dari kondisi sosial politik desa.

Aspek Value Chain Management. Kemampuan pemerintah dalam mengelola rangkaian proses penciptaan produk /layanan dalam sistem e-Gov. Ada 3 indikator yang perlu dikaji, yaitu:

Pertama, *Partner Relationships*. Indikator ini berkaitan dengan dukungan terhadap usaha pemerintah dan jajarannya untuk bekerjasama antar lembaga baik pemerintah, swasta dan pihak eksternal lainnya, terutama untuk pengalihdayaan (*outsourcing*). Dalam penelitian ini, indikator yang dimaksud belum sama sekali dibahas atau direncanakan. Akan tetapi, dalam hal tatakelola sumber daya terkait pengalihdayaan/*outsourcing* memang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (DPMD) akan tetapi pemerintah desa belum sama sekali tidak melaksanakan hal yang dimaksud.

Kedua, *Value Chain Intergration*. Ini berkaitan dengan kemauan/kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai proses dan aktivitas yang ada di birokrasi dengan proses dan aktivitas para mitra kerja lain dengan tujuan akhir memberikan pelayanan yang optimal dan efisien kepada pelanggan. Sampai saat ini kolaborasi aktif dengan konsep kemitraan sudah dilakukan DPMD dan Desa. Akan tetapi, tidak diarahkan untuk pengembangan e-Gov, melainkan sebatas penata kelolaan dan pendayagunaan program saja.

Ketiga, *Public Readiness Assessment*. Hal ini berkaitan ada atau tidaknya mekanisme di lingkungan pemerintah untuk mengkaji sejauhmana kesiapan masyarakat dalam menghadapi implementasi berbagai program e-Gov. Sampai penelitian ini dilakukan, indikator ini tidak pernah dilakukan atau direncanakan untuk dilakukan. Kemungkinan besar disebabkan oleh tingginya volume program lain yang menyebabkan dominasi program.

Tabel 6. Temuan dan Intepretasi Hasil Wawancara Aspek Value Chain Management

No	Dimensi	Uraian	Temuan, Intepretasi Hasil Wawancara
1	<i>Partner Relationships</i>	Berkaitan dengan dukungan terhadap usaha pemerintah dan jajarannya untuk bekerjasama antar lembaga baik pemerintah, swasta dan pihak eksternal lainnya, terutama untuk pengalihdayaan (<i>outsourcing</i>).	Hasil penelitian memperlihatkan belum sama sekali dibahas atau direncanakan. Akan tetapi, dalam hal tatakelola sumber daya terkait pengalihandayaan/ <i>outsourcing</i> memang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (DPMD) akan tetapi pemerintah desa belum sama sekali tidak melaksanakan hal yang dimaksud.
2	<i>Value Chain Intergration</i>	Berkaitan dengan kemauan/kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai proses dan aktivitas yang ada di birokrasi dengan proses dan aktivitas para mitra kerja lain	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sampai saat ini upaya kolaborasi aktif dengan konsep kemitraan sudah dilakukan DPMD dan Desa. Akan tetapi, tidak diarahkan untuk pengembangan e-Gov, melainkan sebatas penatakelolaan dan pendayagunaan program belum dapat direalisasikan oleh pemerintah Desa dan Kabupaten Karawang.
3	<i>Public Readiness Assessment</i>	Hal ini berkaitan ada atau tidaknya mekanisme di lingkungan pemerintah untuk mengkaji sejauhmana kesiapan masyarakat dalam menghadapi implementasi berbagai program e-Gov	Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ini tidak pernah dilakukan atau direncanakan untuk dilakukan. Kemungkinan besar disebabkan oleh tingginya volume program lain yang menyebabkan dominasi program.

Aspek Performance Management. Indikator ini berhubungan dengan kemampuan pemerintah dalam menentukan dan mengukur tingkat keberhasilan program e-Government. Ada 5 (lima) indikator yang harus dikaji yaitu: Pertama, *Client satisfaction*. Hal ini sama sekali belum dilaksanakan untuk mengukur efektivitas pelayanan atau penyelenggaraan e-gov berdasarkan perspektif masyarakat (*users*). Kedua, *Privacy Compliance*. Indikator ini melihat adanya penjaminan hak-hak privacy seseorang/sekelompok orang yang harus dilindungi sebagai bagian dari transaksi dan interaksi dalam sistem e-Gov. Hal ini secara terpisah dilakukan pemerintah namun tidak dalam program e-Government. Ketiga, *Benefit Monitoring*. Hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap manfaat yang dirasakan berbagai kalangan setelah e-Gov diimplementasikan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hal ini tidak ada sama sekali dilakukan oleh semua pihak berkepentingan. Keempat, *Predictability*. berkaitan dengan mekanisme untuk memantau dan mengukur tingkat ketersediaan teknologi informasi yang dibutuhkan yang tersimpan dalam data base, aplikasi, dan teknologi untuk menjalankan sistem e-gov sesuai yang direncanakan dan tidak adanya gangguan yang berarti dikemudian hari. Kelima, *e-Government Maturity Reporting*. Indikator ini berkaitan dengan sistem pelaporan yang baik/efektif dikalangan pemerintahan sehubungan dengan kepentingan pengukuran terhadap keberhasilan capaian sasaran yang ditargetkan diraih oleh aplikasi e-Government. Penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan sudah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam setiap level pemerintahan. Namun, sekali lagi tidak berada dalam ruang lingkup e-Gov.

Uraian analisis di atas, masih memerlukan penajaman analisis yang disesuaikan dengan hasil pengumpulan data di lapangan, khususnya dari Pemerintah Desa. Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kurang memiliki data dan informasi yang terkini, karena diakui oleh DPMD seringkali pihak Pemerintah Desa terlambat melaporkan atau mengirimkan data/informasi. Hal ini membuktikan sementara, bahwa pelaksanaan e-Government belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Tabel 7. Temuan dan Intepretasi Hasil Wawancara Aspek *Performance Management*

No	Dimensi	Uraian	Temuan, Intepretasi Hasil Wawancara
1	<i>Client Satisfaction</i> .	Berkaitan dengan pengukuran efektivitas pelayanan atau penyelenggaraan e-gov	Hasil penelitian memperlihatkan belum sama sekali dibahas atau direncanakan.

		berdasarkan perspektif masyarakat (user)	
2	Kedua, <i>Privacy Compliance</i> .	Berkaitan dengan adanya penjaminan hak-hak privacy seseorang/sekelompok orang yang harus dilindungi sebagai bagian dari transaksi dan interaksi dalam sistem e-Gov.	Hasil penelitian memperlihatkan secara terpisah dilakukan pemerintah namun tidak dalam program e-Government.
3	<i>Benefit Monitoring</i>	Hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap manfaat yang dirasakan berbagai kalangan setelah e-Gov dilaksanakan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ini tidak pernah dilakukan atau tidak sama sekali dilakukan oleh semua pihak berkepentingan.
4	<i>Predictability</i>	berkaitan dengan mekanisme untuk memantau dan mengukur tingkat ketersediaan teknologi informasi yang dibutuhkan yang tersimpan dalam data base, aplikasi, dan teknologi untuk menjalankan sistem e-gov sesuai yang direncanakan dan tidak adanya gangguan yang berarti dikemudian hari;	Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ini tidak pernah dilakukan atau tidak sama sekali dilakukan oleh semua pihak berkepentingan.
5	<i>E-Government Maturity Reporting</i>	berkaitan dengan sistem pelaporan yang baik/efektif dikalangan pemerintahan sehubungan dengan kepentingan pengukuran terhadap keberhasilan capaian sasaran yang ditargetkan diraih oleh aplikasi e-Government.	Penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan sudah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam setiap level pemerintahan. Namun, sekali lagi tidak berada dalam ruang lingkup e-Gov

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan e-government yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Kabupaten Karawang terdiri dari:

Pertama, Visi Pemerintah Kabupaten Karawang sudah mengikuti visi Pemerintah Pusat yang mendukung model pengembangan Sistem informasi pelaporan berbasis internet seperti Siskeudes-Prodeskel tapi belum menyentuh pengembangan layanan kepada

masyarakat, penelitian menunjukkan baru satu desa dari 297 Desa di Kabupaten Karawang yang akan melaksanakan dalam bentuk Aplikasi Simpel Desa. Kedua, dalam hal sumber daya manusia yang mengembangkan teknologi informasi desa saat ini, menjadi belum memenuhi standar yang diharapkan. Kendala terbesarnya adalah proses rekrutmennya yang melibatkan kewenangan Kepala Desa yang terpengaruh oleh hasil proses pemilihan kepala desa yang salahsatu dampaknya menyebabkan terputusnya kaderisasi sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan aplikasi.

Ketiga, proses penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Desa yang ditransformasikan dalam e-gov baru dalam bentuk aplikasi yang menginput data dan informasi mengenai proses-proses pelaporan saja dalam bentuk profil desa (prodeskel), Keuangan Desa (siskeudes). Sementara penyimpanan dan akses distribusi data berada di masing-masing tingkatan lembaga (Desa, Dinas dan Pemkab/Provinsi/Pusat) dan hanya sebatas pelaporan berbasis aplikasi, bukan untuk informasi kepada masyarakat desa.

Keempat, aplikasi yang sudah terakses seperti Siskeudes, Prodeskel dan e-planning pun masih memiliki kekurangan dalam aksesibilitas dan jaringan, karena tidak semua zona atau wilayah di Desa mampu menangkap sinyal untuk internet. Kelima, mekanisme dan monitor manajemen resiko dalam konteks pemerintahan yang berkaitan dengan e-Gov sama sekali belum dibahas.

Saran

Pertama, Visi e-Gov di Desa diupayakan sudah diarahkan untuk menyentuh pengembangan layanan kepada masyarakat desa, jika belum mampu mencakup seluruh desa yang ada di Kabupaten Karawang, dapat dilakukan permodelan yang dilaksanakan oleh beberapa Desa sebagai pilot project. Kedua, sumber daya manusia dalam pengembangan teknologi informasi desa, dapat dibuat standarnya dengan aturan yang mampu menjaga keberlanjutan dan kaderisasi yang tidak terpengaruh kewenangan Kepala Desa (pasca pemilihan kepala desa) sehingga mampu mengoperasikan aplikasi secara optimal.

Ketiga, melaksanakan pemerataan zona atau wilayah Desa yang mampu menangkap sinyal internet dengan membangun jaringan khusus yang meningkatkan akses dari seluruh desa. Keempat, pembahasan dan pelaksanaan mekanisme dan manajemen resiko yang berkaitan dengan e-Gov lebih baik dibahas secara komprehensif dan integratif,

karena hal ini akan memberikan pemahaman terhadap semua pemangku kepentingan mengenai perlunya pengembangan e-Gov di desa sebagai penyambung layanan pemerintah yang terdekat dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. C. (2002). *Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mithew, B. M. dan Michael H. A. (1992). *Analisa Data Kualitatif. (Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, A. (2018). Pembangunan Model Electronic Government Pemerintahan Desa Menuju Smart Desa. *Jurnal Teknik Dan Informatika*, 5(1), 1-5. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/Juti/article/view/81>
- Septiana, E. R. (2017). Pemanfaatan *E-Government* pada Desa Wonokarto untuk Meningkatkan Akurasi Dan Informasi Potensi Desa *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)* 8(1), 45-50 Retrieved from <http://ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/JurnalTam/article/view/86>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang Tahun 2016-2022.
- Rhenald Kasali. (2017).Meluruskan Pemahaman soal "Disruption" Artikel di [kompas.com](https://money.kompas.com/read/2017/05/05/073000626/meluruskan.pemahaman.soal.disruption.?page=all) dengan judul "Meluruskan Pemahaman soal "Disruption"